

Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Dalam Sistem Desentralisasi Asimetris Di Indonesia

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Pada
Program Studi Magister Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Oleh:

JEFFRY RAYNOLD WAYNE PAPARE

2002190014



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeffry Raynold Wayne Papare

NIM : 2002190014

Program Studi : Hukum Program Magister Pasca Sarjana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang berjudul "Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Dalam Sistem Desentralisasi Asimetris Di Indonesia" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapat gelar magister di universitas lain, kecuali pada bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 14 Juli 2022



Jeffry Raynold Wayne Papare



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

JUDUL:

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA
DALAM SISTEM DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA**

Oleh:

Nama : Jeffry Raynold Wayne Papare
NIM : 2002190014
Program Studi : Hukum Program Magister Pasca Sarjana
Peminatan : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar sarjana strata dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 14 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H

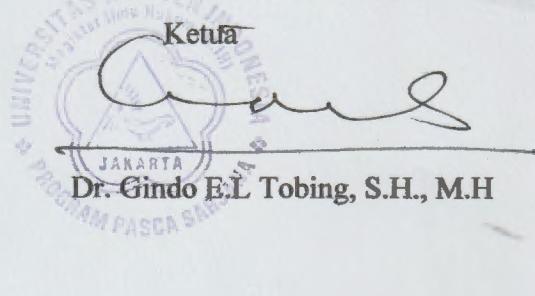
Pembimbing II

Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H

Program Studi Magister Hukum

Ketua

Dr. Gindo E.L Tobing, S.H., M.H



Program Pasca Sarjana

Direktur





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 14 Juli 2022 telah diselenggarakan sidang tugas akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana strata dua Program Studi Hukum, Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Nama : Jeffry Raynold Wayne Papare
NIM : 2002190014
Program Studi : Hukum Program Magister Pasca Sarjana
Peminatan : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Dalam Sistem Desentralisasi Asimetris Di Indonesia" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H

Ketua Sidang

Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H

Penguji

Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A

Penguji

Jakarta, 14 Juli 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jeffry Raynold Wayne Papare
NIM : 2002190014
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Magister Pasca Sarjana
Jenis Tugas Akhir : Strata Dua
Judul : Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Dalam Sistem Desentralisasi Asimetris Di Indonesia

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya tulis saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut merupakan bukan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif,Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta Tanggal 14 Juli 2022

Menyatakan



Jeffry Raynold Wayne Papare

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karuniannya yang memberikan kemampuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Dalam Sistem Desentralisasi Asimetris Di Indonesia”**.

Proses penyusunan tesis ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak yang membantu untuk menyelesaikan penelitian ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memelihara dan menyertai penulis dalam perkuliahan terlebih-lebih dalam penyusunan Tesis ini.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono. S.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Ibu Dr. Bintang R. Simbolon. M. Si selaku Direktur Program Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Gindo L.Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., selaku Pembimbing I yang telah yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta masukan-masukan yang membangun bertujuan untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini.

6. Bapak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta masukan-masukan yang membangun bertujuan untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Abdul Ghoffar Husnan, S.H., M.H., selaku yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan masukan – masukan yang berarti kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Bapak Imam Sujudi, Staf Bapak Daniel Yusmic P. Foekh yang sudah bersedia untuk membantu penulis selama penulis bimbingan dengan Bapak Daniel Yusmic P. Foekh
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia atas ilmu yang bermanfaat serta waktu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Program Magister Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
10. Orang tua tercinta, Ayahanda Jermias Robert Papare dan ibunda Josina J. Rahayaan (+) yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menjadi yang terbaik.
11. Orang tua tercinta, mama/ibu mertua/oma Jessy Louise Kairupan atas semua dukungan moral dan moril yang diberikan kepada penulis.
12. Istriku tercinta Vicky Sylvanie Kairupan dan ketiga anak-anakku yang tersayang Kate Jordan Papare, Casie Joy Papare dan Kyle Denzel Caleb Papare yang selalu mendoakan dan mendukung penulis agar tidak menyerah

dan tetap percaya atas segala apa yang penulis miliki dalam penyusunan Tesis ini.

13. Bapak Thomas Eppe Safanpo, yang sudah banyak membantu penulis baik itu dalam bentuk materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
14. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum UKI dan semua nama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Secara khusus kepada Ketua Angkatan Bang Andi Simanjuntak yang selalu memberikan dorongan kepada penulis agar bisa menyelesaikan tesis ini, juga kepada teman – teman dalam jurusan Hukum Tata Negara yang selalu saling memberikan dorongan dan semangat.
15. Semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan mendoakan saya selama penyusunan Tesis ini.
16. Pada penyusunan tesis, penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat terbuka akan saran dan kritik yang membangun.

Jakarta, Juni 2022
Penulis

Jeffry Raynold Wayne Papare

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian Karya Tugas Akhir.....	ii
Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.....	iii
Persetujuan Tim Pengaji Tugas Akhir.....	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak.....	xii
Abstract.....	xiii

BAB I – PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	15
2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data.....	15
3. Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	17
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	17
1. Kerangka Teori	17
2. Kerangka Konsep.....	18
F. Sistematika Penulisan	24

BAB II - KAJIAN TEORITIS

A. Negara Hukum.....	26
B. Bentuk Susunan Negara	31
D. Desentralisasi	41

BAB III- DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN OPTIMALISASI PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA

A. Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	
Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945	47
1. Sebelum Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945	47
1.1 Daerah Istimewa Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945	51
1.2 Daerah Istimewa Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949	57
1.3 Daerah Istimewa Dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950	62
2. Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	65
2.1 Perdebatan Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah	67
2.2 Hasil Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945	89
B. Desentralisasi Asimetris Di Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah Sesudah Perubahan	91
C. Optimalisasi Peran Majelis Rakyat Papua	97

BAB IV - KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM SISTEM DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.....	104
B. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Irian Jaya/Papua	110
C. Majelis Rakyat Papua Di Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.....	128
D. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Menurut	

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	132
1. Kedudukan Majelis Rakyat Papua	132
2. Kewenangan Majelis Rakyat Papua.....	143
E. Tugas dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Dalam Sistem Desentralisasi Asimetris Di Indonesia	152
F. Hasil Evaluasi Pemerintah Terhadap Kinerja Majelis Rakyat Papua.....	156
G. Daerah-Daerah Yang Menjalankan Desentralisasi Asimetris Di Indonesia	168
1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta	168
2. Daerah Istimewa Aceh.....	170
3. Daerah Istimewa Yogyakarta.....	173
4. Ibukota Negara.....	174
H. Perbandingan Desentralisasi Asimetris Di Berbagai Negara Di Dunia.....	176
1. Hongkong.....	176
2. Puerto Rico.....	179
3. Greenland.....	181
BAB V - PENUTUP	
A. Kesimpulan	185
B. Saran	186
DAFTAR PUSTAKA	189

ABSTRAK

Nama	: Jeffry Raynold Wayne Papare
NIM	: 2002190014
Program Studi / Kekhususan	: Hukum / Tata Negara
Judul Tesis	: Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Dalam Sistem Desentralisasi Asimetris Di Indonesia

Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya MRP dalam UU otsus Papua telah memberikan tatanan baru dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang tadinya sentralisasi menjadi Desentralisasi Asimetris. Berdasarkan uraian diatas Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Didalam Sistem Desentralisasi Asimetris Di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang bersumber dari hasil pengkajian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum. Penulis menganalisis data secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan bahwa kedudukan MRP adalah lembaga sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan sangat terbatas. Masalah lain yang timbul adalah sering terjadinya salah penafsiran terhadap tugas dan wewenang antara lembaga baik itu antara MRP dengan pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat.

Kata Kunci : Kedudukan, Kewenangan, Majelis Rakyat Papua, Desentralisasi Asimetris

ABSTRACT

<i>Name</i>	: Jeffry Raynold Wayne Papare
<i>Student ID Number</i>	: 2002190014
<i>Study Program / Specialty</i>	: Constitutional law
<i>Thesis Title</i>	: Position and Authority of The Papuan People's Assembly In Indonesia's Asymmetric Decentralization System

The Papuan People's Council (MRP) is the cultural representation of indigenous Papuans, which has certain authorities in protecting the rights of indigenous Papuans based on respect for custom and culture, empowering women, and strengthening religious harmony within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The birth of the MRP in the Law of Papua's Special Autonomy has provided a new order in Indonesia's government and state administration system, which was previously centralized to asymmetrical decentralization. Based on the description above, the writer is interested in conducting a research entitled The Position and Authority of the Papuan People's Assembly in the Asymmetric Decentralized System in Indonesia. The type of study used in this research is normative legal research that focuses on literature studies. This research uses a legal approach. Secondary data are being used in this research, such as the results of literature review through the collection of legal materials. The writer analyzed the data qualitatively with a descriptive approach. As well as drawing conclusions using the deductive method. Based on the results of research findings and discussions, the position of the MRP is an institution as a regional institution that has very limited authority. Another problem that arises is the frequent misinterpretation of the duties and authorities between institutions, both between the MRP and the regional government and the central government.

Keywords: Position, Authority, Papuan People's Assembly, Asymmetric Decentralization.